

**ANALISIS POLA PERSEBARAN PELAYANAN UMUM DI WILAYAH  
PEMEKARAN KABUPATEN BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Fakultas  
Geografi**

**Oleh:**

**BARQUDDIN RMO**

**E100110049**

**FAKULTAS GEOGRAFI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS POLA PERSEBARAN PELAYANAN UMUM DI WILAYAH  
PEMEKARAN KABUPATEN BOYOLALI**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

Barquddin RMO

E100110049

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



Jumadi, Ph. D.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS POLA PERSEBARAN PELAYANAN UMUM DI WILAYAH**  
**PEMEKARAN KABUPATEN BOYOLALI**

**OLEH**

**Barquddin RMQ**  
**E100110049**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Geografi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 30 November 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji**

1. **Jumadi, Ph. D.**

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. **Danardono, S.Si. M.Sc.**

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. **M. Iqbal Taufiqurrahman, S.Si. M.Sc.**

(Anggota II Dewan Penguji)

()



**Dekan,**

()

**Drs. Yuli Privana, M.Si.**  
**NIK. 573**

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 November 2020



**Barquddin RMO**  
E100110049

## ANALISIS POLA PERSEBARAN PELAYANAN UMUM DI WILAYAH PEMEKARAN KABUPATEN BOYOLALI

### Abstrak

Skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian untuk mendapatkan gelar sarjana. Pemekaran wilayah banyak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan mewujudkan efektifitas pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan lain sebagainya seperti yang ada di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tidak terkecuali Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah, melalui Perda Nomor 18 Tahun 2018 dilakukanlah pemekaran 3 kecamatan sehingga bertambahlah menjadi 3 kecamatan baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengambilan data sekunder. Metode yang digunakan adalah teknik analisa spasial menggunakan *tool kernel density* yang ada di aplikasi ArcGIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Boyolali belum maksimal karena masih banyak daerah yang masih rendah sebaran pelayanan fasilitas umumnya.

**Kata Kunci :** Kernel density, Pelayanan Umum, Pemekaran Wilayah, Skripsi.

### Abstract

Thesis is one of the requirements that must be met as part of getting a bachelor's degree. Regional expansion is mostly carried out by local governments in Indonesia with the aim of realizing the effectiveness of local government, accelerating the improvement of community welfare, accelerating the improvement of the quality of public services, and so on, as stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. With no exception, Boyolali Regency in Central Java, through Perda No. 18/2018 the expansion of 3 sub-districts was carried out so that they increased to 3 new sub-districts. This research is a descriptive qualitative research, with secondary data collection. The method used is a spatial analysis technique using the kernel density tool available in the ArcGIS application. The results showed that the regional expansion in Boyolali Regency was not maximized because there were still many areas where the distribution of general facilities services was still low.

**Keywords:** Kernel density, Public Service, Regional Expansion, Thesis.

## **1. PENDAHULUAN**

Kebijakan tentang pemerintah daerah yang diberlakukan di Indonesia seperti yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berdampak luas terhadap perkembangan suatu daerah. Adanya undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan undang-undang, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk penataan daerah. Penataan daerah bisa dilakukan dengan cara salah satunya, pemekaran wilayah yang memiliki beberapa tujuan, yaitu: mewujudkan efektifitas pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. (Pasal 31 dan Pasal 32)

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak antara 110°22' - 110°50' Bujur Timur dan 7°36' - 7°71' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 - 1.500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.015,10 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2019 1.054.362 jiwa dengan kepadatan sebesar 1.039 jiwa/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan sebesar 1,37%. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Boyolali sebesar 2.748 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah terdapat di Kecamatan Juwangi sebesar 444 jiwa/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan Topografi wilayah di Kabupaten Boyolali bervariasi mulai dari datar, berombak, bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan ketinggian mulai 75 mdpl sampai dengan 1.500 mdpl. Wilayah dengan topografi terendah terdapat di Kecamatan Banyudono, Teras, Boyolali, Mojosongo dan tertinggi terdapat di Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo dan Musuk. Jarak dari kecamatan ke pusat kota Kabupaten Boyolali juga bervariasi yakni mulai 2 km sampai dengan 70 km (BPS).

Dari berbagai informasi pemekaran daerah Kabupaten Boyolali tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian di daerah pemekaran Kabupaten Boyolali dengan judul “ANALISIS POLA PERSEBARAN PELAYANAN UMUM DI WILAYAH PEMEKARAN KABUPATEN BOYOLALI.” Karena pemekaran daerah Kabupaten Boyolali

baru berjalan 2 tahun maka penulis hanya akan memfokuskan penelitian sebaran fasilitas umum di bidang pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan kecamatan saja.

## **2. METODE**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menjabarkan hasil dari kenampakan dari peta persebaran spasial pelayanan umum di Kabupaten Boyolali. Metode analisis geografi yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis spasial yaitu analisis pola keruangan. Analisis pola keruangan merupakan salah satu metode analisis spesial yang menggambarkan sebaran keruangan gejala geosfer di permukaan bumi. (Yunus, 2008)

Analisis pola keruangan digunakan untuk menggambarkan dan melihat persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali. Metode analisis yang digunakan dalam analisis pola keruangan adalah analisis kernel density. Analisis kernel density adalah formula statistik non parametrik untuk mengestimasi kerapatan yang dapat diaplikasikan pada ArcGIS 10. Dalam konteks analisis pola keruangan, kernel density banyak digunakan untuk menganalisis pola persebaran kerapatan dalam suatu area, salah satunya persebaran pelayanan umum. Fungsi matematika dalam analisis kernel density pada prinsipnya bertujuan memperkirakan persebaran intensitas suatu titik dalam bidang dengan radius tertentu. (Silverman, 1986)

Proses penggunaan *kernel densiy*, yaitu:

1. Buka arctoolbox – spatial analysis – density – kernel density.
2. Masukkan data sebaran fasilitas – area unit pilih square kilometer – klik ok.
3. Reclassify hasil analisa.
4. Buka arctoolbox – spatial analysis – reclass – reclassify – pilih 5 kelas – klik ok.
5. Hasil reclassify kemudian dikonversi menjadi polygon.
6. Buka arctoolbox – conversion tool – from raster – raster to polygon.
7. Hasil polygon dapat ditampilkan ke dalam *lay out* peta.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pola persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali dapat ditemukan dengan metode teknik analisis spasial, menggunakan *tool kernel density* di Aplikasi ArcGIS. Setelah

diproses menggunakan *tool kernel density* maka hasil pola persebaran pelayanan umum yang didapat di Kabupaten Boyolali adalah:

1. Pola persebaran pelayanan umum fasilitas pendidikan Kabupaten Boyolali.

Dari proses analisa menggunakan *tool kernel density* maka pola persebaran pelayanan umum fasilitas pendidikan Kabupaten Boyolali adalah: persebaran layanan sangat rendah, yang meliputi Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Juwangi, dan Kecamatan Selo. Persebaran layanan rendah, yang meliputi Kecamatan Kemusu, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro. Persebaran layanan sedang yang meliputi Kecamatan Klego, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Sawit. Persebaran layanan tinggi, yang meliputi Kecamatan Banyudono, Kecamatan Simo, dan Kecamatan Teras. Serta terakhir, persebaran layanan sangat tinggi, yang meliputi Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Mojosongo.

2. Pola persebaran pelayanan umum fasilitas kesehatan Kabupaten Boyolali.

Dari proses analisa menggunakan *tool kernel density* maka pola persebaran pelayanan umum fasilitas kesehatan Kabupaten Boyolali adalah: persebaran layanan sangat rendah, yang meliputi Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Selo, dan Kecamatan Wonosamodro. Persebaran layanan rendah, yang meliputi Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Nogosari. Persebaran layanan sedang, yang meliputi Kecamatan Ampel dan Kecamatan Klego. Persebaran layanan tinggi, yang meliputi Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Sambu. Serta yang terakhir, daerah yang mempunyai persebaran sangat tinggi adalah Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Mojosongo.

3. Pola persebaran pelayanan umum kantor pemerintahan Kabupaten Boyolali.

Dari proses analisa menggunakan *tool kernel density* maka pola persebaran pelayanan umum kantor pemerintahan Kabupaten Boyolali adalah: persebaran layanan sangat rendah, yang meliputi Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Selo, dan Kecamatan Wonosamodro. Persebaran layanan rendah di Kecamatan Tamansari. Persebaran layanan sedang, yang meliputi Kecamatan Klego, Kecamatan Nogosari, dan Kecamatan Simo. Persebaran layanan tinggi, yang meliputi Kecamatan Boyolali, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan Musuk. Dan terakhir yang mempunyai persebaran layanan sangat tinggi adalah Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit.



## **2. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pola Persebaran Pelayanan Umum Kabupaten Boyolali**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali, yaitu:

### **1. Kepadatan Penduduk.**

Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi maka pola persebaran pelayanan publiknya cenderung akan tinggi, seperti ditemui di wilayah kecamatan Boyolali, Banyudono, Sawit, dan Mojosongo. Sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah maka pola persebaran pelayanan publiknya cenderung rendah, seperti di wilayah kecamatan Juwangi, Selo, dan Wonosamodro.

### **2. Bentang Alam.**

Daerah yang memiliki bentang alam dataran tinggi maka pola persebaran pelayanan publiknya akan cenderung rendah, hal ini terdapat pada wilayah kecamatan Gladagsari dan Selo, persebaran pelayanan publik di kedua kecamatan tersebut rendah karena kedua kecamatan berada di lereng gunung Merapi dan Merbabu.

### **3. Lokasi atau Jarak**

Daerah yang berlokasi di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain atau jaraknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali, maka daerah tersebut akan memiliki pola persebaran pelayanan publik yang rendah. Daerah-daerah tersebut adalah Wonosamodro dan Juwangi di utara, Selo dan Gladagsari di barat. Sedangkan wilayah kecamatan lain yang berbatasan dengan kabupaten lain, tapi pola persebaran pelayanan publiknya tidak rendah karena disebabkan jaraknya yang masih cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali.

## **4. PENUTUP**

Pemekaran wilayah di Kabupaten Boyolali masih banyak kekurangan dalam waktu 2 tahun ini jika dilihat dari pola persebaran pelayanan umum, dikarenakan belum meratanya sebaran pelayanan umum, ada wilayah yang

pola persebarannya sangat tinggi namun banyak wilayah yang persebarannya rendah atau bahkan sangat rendah, terutama di kecamatan hasil pemekaran seperti Gladagsari, Wonosamodro dan Wonosegoro. Peneliti memberikan saran, pemerintah kabupaten Boyolali hendaknya lebih memperhatikan daerah pemekaran yang berada jauh dari lokasi pusat pemerintahan dengan sesegera mungkin membangun lebih banyak fasilitas pelayanan umum, agar tidak terjadi kesenjangan yang makin mencolok dan kecamatan baru hasil pemekaran mampu perlahan mengejar ketertinggalannya dari daerah kecamatan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adryan, Adryan & Erwin, Erwin & Jafrinur, Jafrinur. 2018. Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh. *Journal of Regional and Rural Development Planning*. 2. 269. 10.29244/jp2wd.2018.2.3.269-282.

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

BAPPENAS. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI.

BPS Kabupaten Boyolali. 2020. *Boyolali Dalam Angka 2020*. Boyolali: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.

Data Referensi Kemdikbud. 2019. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota: Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jenis SD. Dipetik 12 05, 2020, dari Data Referensi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11\\_sd.php?kode=030900&level=2](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_sd.php?kode=030900&level=2)

Data Referensi Kemdikbud. 2019. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota: Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jenis SMP. Dipetik 12 05, 2020, dari Data Referensi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11\\_smp.php?kode=030900&level=2](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11_smp.php?kode=030900&level=2)

Data Referensi Kemdikbud. 2019. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Per Kabupaten/Kota: Kabupaten Boyolali. Dipetik 12 05, 2020, dari Data Referensi

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.  
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=030900&level=2>

Jeddawi, M. 2009. Pro Kontra Pemekaran Daerah. Yogyakarta: Total Media.

Khairullah & Cahyadin, Malik. 2006. Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. Yogyakarta.

Kusumaningrat, Merpati. 2017. Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017 (Studi kasus: Kabupaten Boyolali) Dipetik 12 05, 2020, dari [media.neliti.com](https://media.neliti.com/media/publications/201818-analisis-perubahan-penggunaan-dan-pemanf.pdf)  
<https://media.neliti.com/media/publications/201818-analisis-perubahan-penggunaan-dan-pemanf.pdf>

Mahi, Ali Kabul. 2016. Pengembangan Wilayah. Jakarta: Kencana.

Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Poerwardarminta. 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Riyanto, dkk. 2019. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web. Yogyakarta: Gava Media

Subri, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Pembangunan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sumarmi. 2012. Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Malang: Aditya Media.

Suryabrata, Sumadi. 1983. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Kusumaningrat, Merpati. 2017. Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 Dan 2017 (Studi kasus: Kabupaten Boyolali) <https://media.neliti.com/media/publications/201818-analisis-perubahan-penggunaan-dan-pemanf.pdf>